



**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA
TAHUN 2015-2019**

KEMENTERIAN LUAR NEGERI



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL AMERIKA DAN EROPA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

NOMOR: SK. 023/RO/05/2015/04

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA
TAHUN 2015-2019**

DIREKTUR JENDERAL AMERIKA DAN EROPA,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana strategis penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada periode 2015 – 2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa yang telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, dan program;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 – 2019 mengamanatkan seluruh Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Tahun 2015 – 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Tahun 2015 - 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara 4012);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 4700);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 4405);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 4614);
 9. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 10. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
15. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Strategis Kementerian/Lembaga Renstra K/L) 2015 – 2019;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 – 2019;

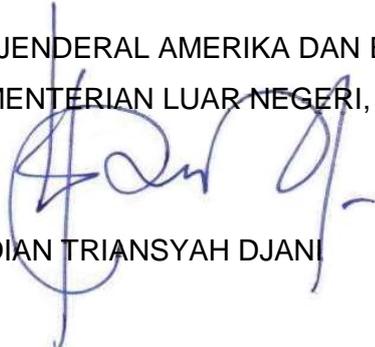
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL AMERIKA DAN EROPA KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA TAHUN 2015 -2019.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Tahun 2015 – 2019 disusun sebagai acuan bagi:
- a. Penyusunan Renstra Satuan Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja-KL) pada Unit Organisasi Eselon I dan Satuan Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
 - c. Koordinasi Perencanaan Kegiatan antar Satuan Kerja Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
 - d. Pengendalian Kegiatan Pembangunan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa.

- KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh Satuan Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa untuk:
- a. Menjabarkan lebih lanjut Renstra Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 2015 – 2019 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon II;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

DIREKTUR JENDERAL AMERIKA DAN EROPA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI,


DIAN TRIANSYAH DJANI

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Tahun 2015-2019 merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyusunan Rencana Strategis sebagai dokumen penting dalam perencanaan kinerja instansi pemerintah diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan SAKIP.

Dalam kerangka tersebut, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa melakukan penyusunan dokumen Renstra ini dengan mengacu pada Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 dan melibatkan seluruh unsur Pimpinan dan staf di lingkungan Ditjen Amerika dan Eropa sehingga proses perencanaan dan penentuan target kinerja diharapkan lebih akuntabel dan transparan serta menjadi milik bersama.

Akhir kata, Renstra Ditjen Amerika dan Eropa 2015-2019 diharapkan dapat menjadi dokumen rujukan utama dalam kerangka akuntabilitas pelaksanaan manajemen strategis organisasi menjawab tantangan 5 (lima) tahun ke depan dalam pelaksanaan tugas hubungan luar negeri Indonesia di kawasan Amerika dan Eropa.

Jakarta, 27 Mei 2015

Direktur Jenderal Amerika dan Eropa



Dian Triansyah Djani

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL AMERIKA DAN EROPA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA TAHUN 2015-2019

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I ANALISIS SWOT	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	
II.1 Visi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	2
II.2 Misi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	2
II.3 Tujuan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	5
II.4 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	6
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Matriks Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Amerika dan Eropa	9
Lampiran 2: Matriks Target Kinerja Ditjen Amerika dan Eropa	14

BAB I

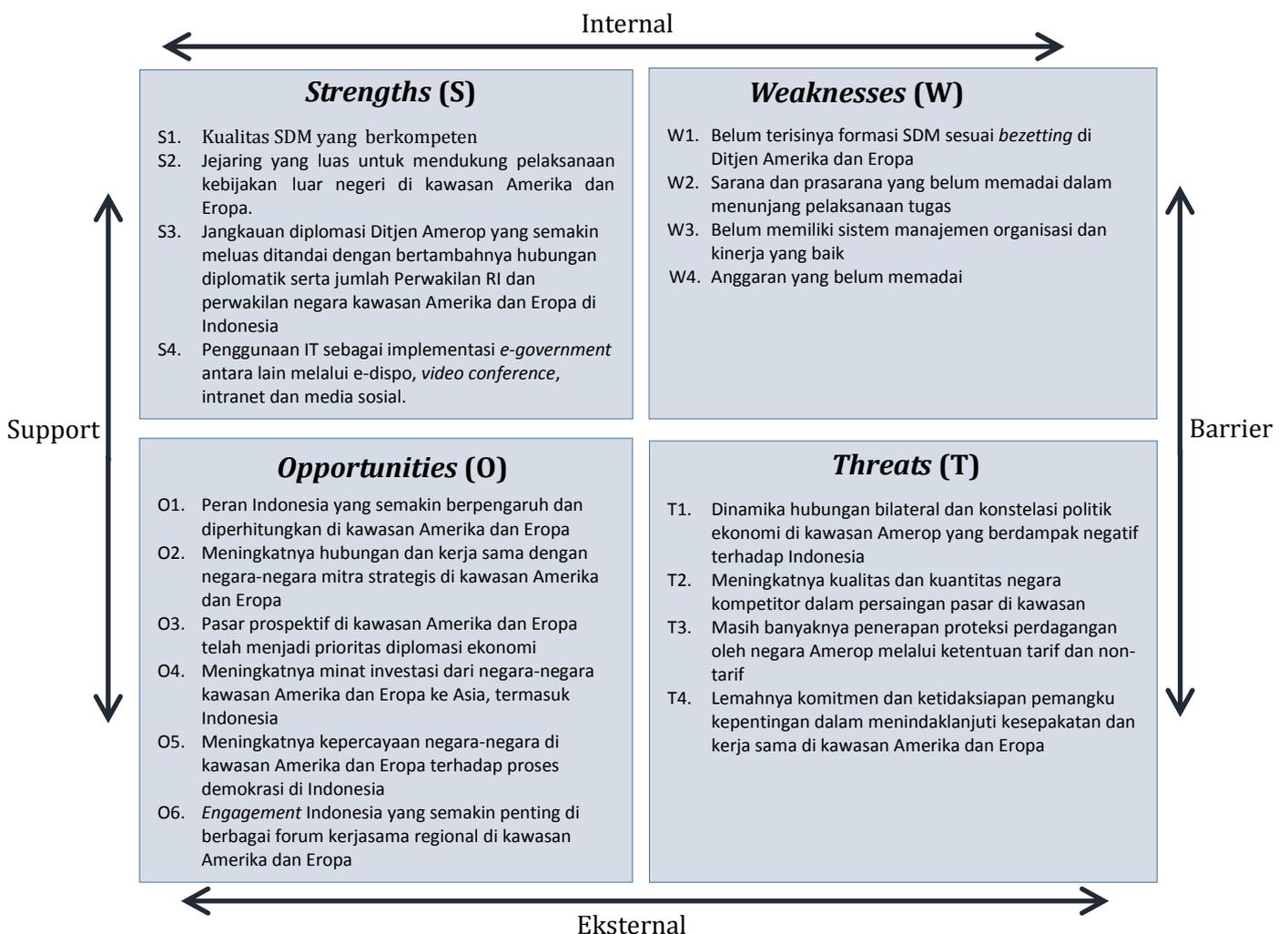
ANALISIS SWOT

DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA

Kawasan Amerika dan Eropa memiliki nilai strategis yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan nasional, antara lain dukungan terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI dan mitra kerja sama di berbagai bidang.

Dalam pelaksanaan diplomasi sesuai dengan Nawacita Presiden dan arahan Menlu RI serta Renstra Kementerian Luar Negeri 2015-2019, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa melaksanakan tiga prioritas diplomasi: ekonomi, kemaritiman dan kerja sama intra kawasan. Untuk mendukung diplomasi tersebut, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa juga melakukan penguatan dukungan manajemen dan Sumber Daya Manusia.

Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor keunggulan dan kelemahan organisasi, serta peluang dan ancaman, yang mempengaruhi strategi pelaksanaan diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa (Analisis SWOT) sebagai berikut:



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA

II.1 Visi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

Visi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Wibawa Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat”

Terwujudnya Wibawa Diplomasi adalah terlaksananya penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan negara lain yang disegani dan dihormati oleh dunia internasional karena peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional.

Kawasan Amerika dan Eropa adalah wilayah yang mencakup negara-negara (83 negara) yang terletak di benua Amerika dan benua Eropa beserta teritorinya yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Jati Diri Bangsa adalah identitas/ciri khas yang menandai keberadaan bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain di dunia.

Negara Maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan mengelola wilayah lautnya untuk kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan serta membangun konektivitas dan pertahanan maritim.

Untuk Kepentingan Rakyat adalah pemenuhan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat guna membawa kemakmuran bagi masyarakat luas, bangsa, dan negara.

II.2 Misi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

Dalam upaya mendukung capaian visi ***“Terwujudnya Wibawa Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat”***, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa telah menetapkan 5 (lima) misi yang diturunkan dari misi Kementerian Luar Negeri, yaitu:

1. Meningkatkan peran Indonesia sebagai negara *middle power* dalam kerja sama bilateral dan regional di kawasan Amerika dan Eropa untuk memajukan kepentingan nasional
2. Memperkuat diplomasi maritim di kawasan Amerika dan Eropa
3. Meningkatkan diplomasi ekonomi di kawasan Amerika dan Eropa

4. Mendorong tindak lanjut kerjasama Indonesia dengan negara-negara dan organisasi regional di kawasan Amerika dan Eropa yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan nasional
5. Memperkuat organisasi, manajemen dan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

MISI 1:

Meningkatkan peran Indonesia sebagai negara *middle power* dalam kerja sama bilateral dan regional di kawasan Amerika dan Eropa untuk memajukan kepentingan nasional

Meningkatkan adalah upaya untuk mengubah suatu kondisi menjadi lebih tinggi/kuat/baik dari sebelumnya.

Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

Negara *middle power* adalah negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar di wilayahnya.

Kerja sama bilateral dan regional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh negara yang menyangkut aspek bilateral dan regional untuk mencapai tujuan bersama.

Kawasan Amerika dan Eropa adalah wilayah yang mencakup negara-negara (83 negara) yang terletak di benua Amerika dan benua Eropa beserta teritorinya yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Kepentingan Nasional adalah amanat yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial).

MISI 2:

Memperkuat diplomasi maritim di kawasan Amerika dan Eropa

Memperkuat adalah menjadikan lebih kuat dari kondisi sebelumnya.

Diplomasi maritim adalah negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih atau dengan organisasi internasional mengenai kerja sama maritim.

Kawasan Amerika dan Eropa adalah wilayah yang mencakup negara-negara (83 negara) yang terletak di benua Amerika dan benua Eropa beserta teritorinya yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

MISI 3:

Meningkatkan diplomasi ekonomi di kawasan Amerika dan Eropa

Meningkatkan adalah upaya untuk mengubah suatu kondisi menjadi lebih tinggi/kuat/baik dari sebelumnya.

Diplomasi ekonomi adalah pemanfaatan alat politik internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui berbagai kerja sama seperti pembangunan (termasuk kesehatan, pendidikan dan pertanian), energi, lingkungan hidup, keuangan dan pangan.

Kawasan Amerika dan Eropa adalah wilayah yang mencakup negara-negara (83 negara) yang terletak di benua Amerika dan benua Eropa beserta teritorinya yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

MISI 4:

Mendorong tindak lanjut kerjasama Indonesia dengan negara-negara dan organisasi regional di kawasan Amerika dan Eropa yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan nasional

Mendorong adalah suatu tindakan untuk menganjurkan atau mendesak pihak lain agar berbuat sesuatu.

Tindak Lanjut adalah suatu tindakan bagi proses langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang dari kesepakatan kerjasama oleh para pemangku kepentingan.

Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh negara yang menyangkut aspek bilateral dan regional untuk mencapai tujuan bersama.

Kawasan Amerika dan Eropa adalah wilayah yang mencakup negara-negara (83 negara) yang terletak di benua Amerika dan benua Eropa beserta teritorinya yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Didukung adalah disokong, dibantu.

Pemangku Kepentingan Nasional adalah segenap pihak dalam negeri yang memiliki kepentingan dan terkait dengan isu hubungan luar negeri.

MISI 5:

Memperkuat organisasi, manajemen dan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

Memperkuat adalah meningkatkan menjadi lebih tinggi/baik.

Organisasi adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar, serta dengan hubungan kerja yang rasional.

Manajemen adalah kapasitas untuk mengelola dan mengatur sehingga sesuatu berjalan dengan transparan, efektif dan efisien.

Kualitas SDM adalah mutu personil yang handal dan mampu melaksanakan tugas dengan baik, memiliki kecakapan dan keterampilan tinggi

II.3 Tujuan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

Tujuan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Luar Negeri. Terdapat dua (2) tujuan Ditjen Amerop yang merupakan turunan dari tujuan Kementerian Luar Negeri sebagai berikut:

1. Peran Indonesia dalam kerja sama internasional di kawasan Amerika dan Eropa yang berpengaruh

Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

Kerja Sama Internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh negara yang menyangkut aspek bilateral, regional, dan internasional untuk mencapai tujuan bersama.

Kawasan Amerika dan Eropa adalah wilayah yang mencakup negara-negara (83 negara) yang terletak di benua Amerika dan benua Eropa beserta teritorinya yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Berpengaruh adalah mempunyai pengaruh terhadap pengambil kebijakan isu-isu bilateral, regional, dan global.

Tujuan Renstra Ditjen Amerop merupakan *cascading* (turunan) dari Renstra Kemenlu. Pencapaian target Tujuan Renstra Kemenlu tersebut menjadi tanggung jawab beberapa unit organisasi Eselon I Kemenlu (Ditjen Amerop, Ditjen Aspasaf, Ditjen KS ASEAN, Ditjen Multilateral). Adapun target Tujuan Ditjen Amerop yang ditetapkan oleh Kemenlu dapat dilihat secara *cascading* pada tabel berikut:

Tujuan Renstra Kemenlu	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenlu	Target IKU Kemenlu	Tujuan Renstra Ditjen Amerop	Target yang diamanatkan kepada Ditjen Amerop
Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh	Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional	89%	Peran Indonesia dalam kerja sama di kawasan Amerika dan Eropa yang berpengaruh	90%

2. Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri di kawasan Amerika dan Eropa

Nilai manfaat ekonomi adalah jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara.

Optimal adalah paling baik; tertinggi; dan paling menguntungkan.

Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek bilateral regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi-organisasi, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Kawasan Amerika dan Eropa adalah wilayah yang mencakup negara-negara (83 negara) yang terletak di benua Amerika dan benua Eropa beserta teritorinya yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Pencapaian target Tujuan Nilai Manfaat Ekonomi tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Ditjen Amerop, Ditjen Aspasaf dan Perwakilan RI. Adapun, target yang diamanatkan kepada Ditjen Amerop adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Utama	Target
Jumlah negara akreditasi di wilayah Amerika dan Eropa yang mengalami peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	25 negara
Jumlah negara akreditasi di wilayah Amerika dan Eropa yang mengalami peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia	8 negara
Jumlah negara akreditasi di wilayah Amerika dan Eropa dengan peningkatan kerja sama investasi	10 negara

II.4 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

Sasaran Strategis utama Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa yang hendak dicapai pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Peran Indonesia di kawasan Amerika dan Eropa yang meningkat

Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

Kawasan Amerika dan Eropa adalah wilayah yang mencakup negara-negara (83 negara) yang terletak di benua Amerika dan benua Eropa beserta teritorinya yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Meningkat adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya

Sasaran strategis ini diukur melalui persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti dan persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dan ditindaklanjuti pada forum kerja sama intrakawasan, sebagaimana tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peran Indonesia di kawasan Amerika dan Eropa yang meningkat	Persentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti	70%	72%	74%	76%	78%
	Persentase prakarsa/rekomendasi yang diterima dan ditindaklanjuti pada forum kerja sama intrakawasan	80%	80%	80%	80%	80%

Selain sasaran strategis tersebut diatas yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa perlu mendukung capaian sasaran strategis Kementerian Luar Negeri lainnya, yaitu:

- **Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional.**

Dukungan adalah sokongan/bantuan.

Komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu.

Tinggi adalah (mendukung) secara penuh.

Kebijakan luar negeri adalah sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Kesepakatan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional	Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh <i>stakeholders</i> dalam negeri	70%

Catatan: pencapaian target Sasaran Strategis ini menjadi tanggungjawab beberapa unit organisasi Eselon I Kemenlu (tidak hanya Ditjen Amerop).

- **Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat.**

Diplomasi maritim dan perbatasan adalah negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih mengenai kerja sama kemaritiman dan penetapan serta penanganan permasalahan perbatasan laut dan darat.

Kuat adalah mempunyai keunggulan / tidak mudah goyah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat	Indeks diplomasi maritim dan perbatasan	39%

Catatan: pencapaian target Sasaran Strategis ini menjadi tanggungjawab beberapa unit organisasi Eselon I Kemenlu (tidak hanya Ditjen Amerop).

- **Diplomasi ekonomi yang kuat.**

Diplomasi ekonomi adalah pemanfaatan alat politik internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui berbagai kerja sama seperti pembangunan (termasuk kesehatan, pendidikan dan pertanian), energi, lingkungan hidup, keuangan, dan pangan.

Kuat adalah mempunyai keunggulan dibanding negara lain.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Diplomasi ekonomi yang kuat	Indeks diplomasi ekonomi	67%

Catatan: pencapaian target Sasaran Strategis ini menjadi tanggungjawab beberapa unit organisasi Eselon I Kemenlu (tidak hanya Ditjen Amerop).

Lampiran 1:

Matriks Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Amerika dan Eropa

No	Arah Kebijakan Kemenlu	No	Strategi Kemenlu	No	Strategi Ditjen Amerika dan Eropa
1.	Penguatan diplomasi maritim dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia	1.	Mempertahankan integritas wilayah NKRI	1.	Mempertahankan dan meningkatkan jumlah dukungan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa terhadap UNCLOS yang mengakui wawasan nusantara sebagai kesatuan/integritas wilayah NKRI.
		2.	Mendorong kerja sama pengamanan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya alam hayati non hayati laut.	2.	Meningkatkan jumlah kesepakatan/kerja sama bilateral dan regional serta meningkatkan implementasi dari kerjasama di bidang kemaritiman meliputi: pengelolaan sumber daya alam hayati non hayati laut, termasuk <i>Illegal Unreported and Unregulated/IUU Fishing</i> , antara lain dengan Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Norwegia, Rusia, Uni Eropa.
		3.	Mendorong peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan dan keselamatan laut, <i>search and rescue</i> , penanganan bencana di laut, serta perlindungan lingkungan laut.	3.	Meningkatkan jumlah kesepakatan/kerja sama bilateral dan regional serta meningkatkan implementasi dari kerjasama di bidang keamanan dan keselamatan laut, <i>search and rescue</i> , penanganan bencana di laut, serta perlindungan lingkungan laut antara lain dengan Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Belanda, Jerman, Peru, Kolombia, Ekuador, Chile, Uni Eropa.
		4.	Meningkatkan upaya-upaya diplomasi dalam mewujudkan kerangka kerja sama maritim yang mendukung perwujudan konektivitas maritim dan mengedepankan jati diri Indonesia sebagai negara maritim.	4.	Meningkatkan upaya-upaya diplomasi bilateral dan regional dalam mewujudkan kerja sama maritim yang mendukung perwujudan konektivitas, termasuk pengembangan infrastruktur antara lain dengan AS, Rusia, Norwegia, Perancis, Italia,

					Yunani, Jerman, Kroasia, Uni Eropa, ASEM.
		5.	Membantu pembangunan kekuatan pertahanan maritim melalui diplomasi pertahanan dengan berbagai negara sahabat.	5.	Meningkatkan jumlah kesepakatan/kerja sama bilateral dan regional serta meningkatkan implementasi dari kerjasama di bidang pertahanan maritim antara lain dengan Amerika Serikat, Brazil, Spanyol, Belanda, Perancis, Uni Eropa.
2.	Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara <i>middle power</i> di dunia internasional	1.	Memperkuat postur diplomasi sehingga mampu meredam ancaman disintegrasi bangsa di berbagai forum internasional yang relevan.	1.	Meningkatkan pendekatan dan upaya memasukkan di dalam <i>joint statement</i> atau dalam <i>outcome documents</i> penegasan dukungan terhadap NKRI, baik dalam forum bilateral maupun dalam forum regional.
		2.	Mengintensifkan kerja sama bilateral, regional dan internasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional, seperti: korupsi, terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, perdagangan gelap narkoba, perompakan perdagangan senjata ilegal, <i>illegal fishing</i> .	2.	Meningkatkan jumlah kesepakatan/kerja sama bilateral dan regional serta meningkatkan implementasi dalam penanggulangan kejahatan transnasional, seperti: korupsi, terorisme, penyelundupan dan perdagangan manusia, perdagangan gelap narkoba, perdagangan senjata ilegal, <i>IUU fishing</i> , <i>cyber crime</i> , antara lain dengan AS, Kanada, Rusia, Turki, Denmark, Perancis, Venezuela, Brazil, Kolombia, Uni Eropa, ASEM dan FEALAC.
		3.	Memperkuat dialog dan kerja sama konstruktif di bidang pemajuan demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM, toleransi agama, di forum Internasional.	3.	Meningkatkan jumlah kerja sama di bidang pemajuan demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM, toleransi agama, sosial budaya, dengan negara-negara dan organisasi regional di kawasan Amerika dan Eropa, antara lain dengan Kanada, AS, Norwegia, Austria, Rusia, Inggris, Swedia, Vatikan, Uni Eropa, ASEM, FEALAC.
		4.	Memperkuat peran Indonesia sebagai negara <i>Middle Power</i> dengan memanfaatkan forum terkait di antaranya	4.	Meningkatkan partisipasi aktif Indonesia sebagai negara <i>middle power</i> dalam forum regional, baik sebagai anggota penuh maupun sebagai observer, antara lain dalam: ASEM, FEALAC,

			melalui MIKTA.		Pacific Alliance, MIKTA, maupun dalam forum bilateral dengan sesama negara <i>middle power</i> , seperti: Turki, Brazil, Meksiko.
		5.	Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global dan internasional melalui penguatan kerja sama bilateral, khususnya dengan negara mitra strategis dan organisasi intra dan antar kawasan.	5.	Meningkatkan upaya terwujudnya hubungan bilateral dengan negara-negara prospektif menjadi <i>Strategic/Comprehensive Partnership</i> , antara lain dengan Kanada, Meksiko, Italia.
		6.	Meningkatkan kerja sama konektivitas kawasan melalui IORA, APEC, ASEAN, ASEM, FEALAC.	6.	Meningkatkan kerja sama konektivitas kawasan melalui ASEM, FEALAC, Uni Eropa.
3.	Peningkatan diplomasi ekonomi	1.	Memperkuat diplomasi ekonomi pada forum bilateral, regional, dan global untuk menopang kemandirian ekonomi nasional.	1.	Meningkatkan kerja sama ekonomi pembangunan, termasuk <i>transfer of technology</i> dan <i>capacity building</i> , antara Indonesia dengan negara-negara dan organisasi regional di kawasan Amerika dan Eropa.
		2.	Memperluas dan meningkatkan akses pasar bagi produk barang dan jasa Indonesia, serta meningkatkan arus investasi, dan pariwisata ke Indonesia, serta mendorong perlindungan pasar domestik dari praktek perdagangan yang tidak adil.	2.	Memperluas dan meningkatkan akses pasar, serta mengupayakan penyelesaian hambatan perdagangan tarif dan non-tarif bagi produk barang dan jasa Indonesia di negara-negara dan organisasi regional di kawasan Amerika dan Eropa.
		3.	Memanfaatkan forum regional dan internasional untuk membentuk norma dan arsitektur keuangan, investasi, dan perdagangan internasional yang memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.	3.	Mendorong peningkatan jumlah kerja sama di bidang keuangan, maupun kerja sama antar lembaga keuangan perbankan/ non-perbankan dengan negara-negara dan organisasi regional di kawasan Amerika dan Eropa.

		4.	Memperkuat diplomasi Indonesia pada pasar prospektif.	4.	Meningkatkan jumlah misi ekonomi ke negara akreditasi maupun ke Indonesia, khususnya terkait dengan pasar prospektif di kawasan Amerika dan Eropa.
		5.	Mendorong masuknya investasi asing pada sektor-sektor prioritas bagi Indonesia, serta memfasilitasi dan mendorong serta melindungi investasi Indonesia di luar negeri. Perhatian khusus diberikan pada Perjanjian Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) bilateral serta kelanjutan perundingan perjanjian investasi.	5.	Mendorong masuknya investasi asing pada sektor-sektor prioritas bagi Indonesia melalui forum bilateral dan regional, serta memfasilitasi investasi Indonesia di kawasan Amerika dan Eropa.
		6.	Merumuskan saran kebijakan terkait pengelolaan perundingan berbagai kerja sama ekonomi seperti <i>Preferential Tariff Agreement</i> (PTA), <i>Free Trade Agreement</i> (FTA), <i>Comprehensive Economic Partnership</i> (CEPA) termasuk <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP) sesuai dengan kepentingan nasional.	6.	Meningkatkan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara dan organisasi regional kawasan Amerika dan Eropa, antara lain melalui mekanisme <i>Preferential Tariff Agreement</i> (PTA), <i>Free Trade Agreement</i> (FTA), dan <i>Comprehensive Economic Partnership</i> (CEPA), antara lain <i>European Free Trade Area/EFTA</i> .
		7.	Mendorong perluasan potensi perdagangan, investasi, pariwisata, dan pengembangan infrastruktur maritim serta pengelolaan kekayaan maritim.	7.	Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dari kawasan Amerika dan Eropa.
4.	Peningkatan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan	1.	Mendorong implementasi komitmen nasional atas kesepakatan bilateral, regional, interregional, multilateral, dan global.	1.	Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti kesepakatan bilateral dan interregional di kawasan Amerika dan Eropa.
		2.	Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap tindak lanjut/ implementasi	2.	Meningkatkan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut/ implementasi oleh

			oleh pemangku kepentingan atas hasil diplomasi atau kesepakatan internasional.		pemangku kepentingan atas hasil diplomasi atau kesepakatan bilateral dan interregional di kawasan Amerika dan Eropa.
5.	Peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel, serta kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri yang berbasis teknologi informasi	1.	Melakukan penataan organisasi yang adaptif, peningkatan evaluasi kinerja, dan tata kelola Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.	1.	Melakukan penataan organisasi yang adaptif, peningkatan evaluasi kinerja, dan tata kelola Ditjen Amerika dan Eropa.
		2.	Memperkuat sistem manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dengan dukungan IT.	2.	Memperkuat sistem manajemen kinerja Ditjen Amerika dan Eropa dengan dukungan IT.
		3.	Mewujudkan manajemen SDM Kementerian Luar Negeri yang berbasis kompetensi dan kinerja yang transparan dan akuntabel	3.	Mewujudkan manajemen SDM Ditjen Amerika dan Eropa yang berbasis kompetensi dan kinerja yang transparan dan akuntabel.
		4.	Meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri melalui pengembangan keahlian khusus yang mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri, dengan prioritas pada keahlian seperti <i>asset recovery</i> , hukum laut internasional, dan riset strategis.	4.	Meningkatkan kompetensi SDM Ditjen Amerika dan Eropa melalui pengembangan keahlian khusus seperti bahasa asing, <i>market intelligence</i> , manajemen, dan IT dalam mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri.

Lampiran 2:

Matriks Target Kinerja Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

Program	Sasaran Strategis Program	Indikator	Target					Alokasi (Rp juta rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	Peran Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa yang meningkat	Persentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti	70%	72%	74%	76%	78%	12.194	13.414	14.755	16.230	17.852
		Persentase prakarsa/ rekomendasi Indonesia yang diterima dan ditindaklanjuti pada forum kerja sama intra-kawasan	80%	80%	80%	80%	80%	3.173	3.490	3.839	4.223	4.646